

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Agribisnis

##### a. Pengertian agribisnis

Menurut asal muasal kata agribisnis berasal dari kata *Agribusiness*, dimana agri berasal dari kata *agriculture* yang berarti pertanian atau kegiatan yang berorientasi profit. Jadi secara sederhana agribisnis (*Agribusiness*) adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian berorientasi profit. Istilah “*Agribusiness*” untuk pertama kali dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1995, ketika John H. davis dan Ray goldberg kembali lebih memasyarakatkan agribisnis melalui buku mereka yang berjudul “*A Conception Agribusiness*” yang terbit pada tahun 1957 di Harvard University. Ketika itu kedua penulis bekerja sebagai guru besar pada Universitas tersebut. Tahun 1957, itulah dianggap oleh para pakar sebagai tahun kelahiran dari konsep agribisnis.<sup>1</sup>

Sedangkan di indonesia, istilah agribisnis diperkenalkan pada tahun 1980-an sebagai upaya untuk merombak pola bertani tradisional menjadi pertanian modern yang berorientasi pasar, bersifat komersial dan mengadopsi pola manajemen modern, termasuk mengadopsi teknologi yang diperlukan. Agribisnis hakikatnya adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang

---

<sup>1</sup>Silvana Maulidah, *Pengantar Manajemen Agribisnis* (Malang : Universitas Brawijaya Press(UB Press),2012), 3.

mendukungnya.<sup>2</sup>Namun selain berorientasi hasil (*product oriented*), usaha agribisnis juga harus memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam secara serius.UU No. 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya mengisyaratkan bahwa dominasi dan campur tangan pemerintah terhadap petani dalam pembangunan pertanian semakin dikurangi, tetapi menjadi subjek dan penentu utama keberhasilan usaha tani yang dilakukan. Di Indonesia, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan implementasi dari konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas, melalui peningkatan produksi produksi pertanian, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.<sup>3</sup>

Agribisnis dari cara pandang ekonomi ialah usaha penyediaan pangan. Pendekatan analisis mikro memandang agribisnis sebagai unit sistem industri dan suatu komoditas tertentu, yang membentuk sektor ekonomi secara regional atau nasional.Sedangkan pendekatan analisis makro memandang agribisnis sebagai suatu unit perusahaan yang bergerak, baik dalam salah satu subsistem agribisnis, maupun hanya satu atau lebih subsistem dalam satu lini komoditas atau lebih dari satu lini komoditas.

Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan

---

<sup>2</sup>U.Maman, Manajemen Agribisnis Syariah Berdasarkan Pendekatan Sistem Agribisnis, *Jurnal Agribisnis* 8, No. 1, (2014) : 63

<sup>3</sup> Siti Arwati, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*( Makassar : CV Inti Mediatamar, 2018), 5-6.

dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Dengan definisi ini dapat diturunkan ruanglingkup agribisnis yang mencakup semua kegiatan pertanian yang dimulai dengan pengadaan penyaluran sarana produksi (*the manufacture and distribution of farm supplies*), produksi usaha tani (*production the farm*), dan pemasaran (*marketing*) produksi usaha tani ataupun olahannya. Ketiga kegiatan ini mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga gangguan pada salah satu kegiatan akan berpengaruh terhadap kelancaran seluruh kegiatan dalam bisnis. Karenanya, agribisnis digambarkan sebagai satu sistem yang terdiri dari tiga subsistem, serta tambahan satu subsistem yaitu lembaga penunjang.<sup>4</sup>

Sementara itu, menurut pandangan islam agribisnis adalah bisnis pertanian yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT serta bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat islam.<sup>5</sup> Melalui ajarannya yang bersifat *qauniyyah* (melalui ciptaan-Nya), Al-Qur'an memberi dorongan kepada manusia untuk berusaha membangun sektor agribisnis secara profesional dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan syariah. Islam merupakan agama yang ajarannya sangat lengkap merangkum segala aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> Silvana Maulidah, *Pengantar Manajemen Agribisnis*, 5.

<sup>5</sup> Jefri Putri Nugraha, "Manajemen Agribisnis Syari'ah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Agama Islam* 11, No.1 (2018): 17, diakses pada 27 April, 2019, <http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/issue/view/4>.

lingkup sektor agribisnis. Sebagai contoh, umat manusia dituntut untuk memajukan sektor agribisnis secara berkelanjutan dalam arti tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta tidak membuat kerusakan di muka bumi<sup>6</sup>. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ  
خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya :*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Al-A'raf: 56)*<sup>7</sup>

Selain itu, diharapkan dapat meluruskan berbagai masalah penyalahgunaan sektor agribisnis yang berkaitan dengan pelanggaran syariah Islam dan nilai-nilai kesucian martabat manusia itu sendiri. Untuk itu, para da'i Islam dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan proporsional mengenai sektor agribisnis dengan tujuan antara lain sebagai berikut.

<sup>6</sup> Jefri Putri Nugraha, "Manajemen Agribisnis Syari'ah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 23.

<sup>7</sup> Alquran, Al-A'raf ayat 56, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syaamil Quran, 2012), 157.

- 1) Mampu menelaah sektor agribisnis sebagai berkah Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai alat dakwah untuk meningkatkan keimanan umat manusia, terutama para pelaku agribisnis.
- 2) Mencegah terjadinya penyalahgunaan sektor agribisnis oleh umat manusia dan para pelaku agribisnis, khususnya kearah hal-hal yang merusak syariah Islam seperti melakukan pengolahan komoditas agribisnis menjadi bahan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT, melaksanakan agribisnis dengan metode-metode merusak lingkungan, serta menggunakan teknik-teknik bioteknologi mutakhir dalam upaya meningkatkan produksi agribisnis yang tidak sesuai dengan syariah Islam.

Pengelolaan usaha agribisnis harus dilakukan secara profesional dengan menggunakan sistem manajemen yang tepat. Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumberdaya organisasi, baik sumberdaya manusia, modal, material, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai sebuah organisasi, sistem agribisnis memerlukan suatu pekerjaan yang dikelola dengan benar, rapi, jelas, terarah, tertib, dan teratur sebagaimana yang ditekankan oleh syariah Islam. Hal ini dijelaskan dalam Hadist riwayat Thabrani serta Tirmidzi dan Nasa'i.

*“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaan, dilakukan*

*secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).”(HR.Thabrani)*

*“Tinggalkan oleh engkau perbuatan yang meragukan menuju perbuatan yang tidak meragukan.”(HR.Tirmidzi dan Nasa’i)*

Rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dikenal sebagai fungsi-fungsi manajemen yang juga diterapkan dalam manajemen agribisnis. Hanya saja, penerapannya berbeda-beda berdasarkan karakteristik usaha, skala usaha, jenis komoditas, dan variasi-variasi lainnya. Fungsi-fungsi manajemen berlaku pada setiap tahapan kegiatan agribisnis, baik manajemen produksi, agroindustri, pemasaran, maupun dalam manajemen risiko agribisnis.<sup>8</sup>

#### **b. Kelembagaan/Organisasi dalam Agribisnis**

Agribisnis merupakan suatu system yang terdiri dari sub system, mulai pengadaan sarana produksi sampai pemasaran hasil olahan. Jenis usaha dalam bidang agribisnis juga sangat beragam dan ukurannya juga bervariasi. Dari kondisi ini mengakibatkan banyak lembaga yang terlibat untuk menangani. Dukungan kelembagaan agribisnis ini sangat dibutuhkan dan kemajuan agribisnis sangat dipengaruhi oleh peran serta lembaga pendukung.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah berupa tradisi baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan

---

<sup>8</sup>U.Maman, *Manajemen Agribisnis Syariah Berdasarkan Pendekatan Sistem Agribisnis*, 63.

<sup>9</sup>Sri Wahyuningsih, *Pengembangan Agribisnis Ditinjau dari Kelembagaan*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* 3, No. 1, (2007), 1.

keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Untuk lebih mengenal kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis khususnya di pedesaan, berbagai bentuk kelembagaan adalah sebagai berikut:

1) Kelembagaan sarana produksi

Kelembagaan sarana produksi merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi. Contoh kelembagaan yang berdiri di pedesaan seperti: BUMD, Koperasi Unit Desa (KUD) dan usaha perdagangan swasta. Kelembagaan ini pada umumnya melakukan usaha dalam produksi, perdagangan/pemasaran sarana produksi seperti pupuk, pestisida, dan benih yang diperlukan petani.

a) Produsen Saprodi

Kelembagaan sarana produksi ini ada yang berfungsi sebagai produsen atau perusahaan yang bergerak dibidang industri pupuk.

b) Distributor/penyalur saprodi

Kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang distribusi/penyaluran sarana produksi ini cukup banyak jumlahnya, baik yang berstatus sebagai perusahaan BUMD maupun swasta dan koperasi/KUD. Kelembagaan ini tersebar di semua-sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura di daerah.

- c) Asosiasi  
Untuk mengkoordinasi kegiatan baik dibidang produksi maupun distribusi sarana produksi.
- 2) Kelembagaan usaha tani/ produksi  
Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani/ produksi meliputi:
  - a) Rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura
  - b) Kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani
  - c) Kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan
- 3) Kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil  
Kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil ini antara lain:
  - a) Kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen meliputi: usaha jasa perontokan, usaha pengemasan, sortasi, grading yang dilakukan oleh pedagang dan lain sebagainya
  - b) Kelembagaan usaha di bidang pengolahan (agroindustri) seperti perusahaan penggilingan industri tepung tapioka, industri kecap, dan sebagainya
  - c) Kelembagaan lumbung desa yang berperan untuk mengatasi masalah pangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendesak, dimana ketersediaan pangan tidak mencukupi sementara untuk memperolehnya masyarakat relatif tidak memiliki daya beli

- 4) Kelembagaan pemasaran hasil  
Kelembagaan pemasaran meliputi kelembagaan yang terkait dalam sistem tataniaga hasil pertanian sejak lepas dari produsen sampai ke konsumen. Bidang pemasaran hasil pertanian dapat juga bertugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitas dan pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian.
- 5) Kelembagaan jasa layanan pendukung  
Diantara banyak kelembagaan jasa pendukung ada beberapa yang dianggap penting, antara lain :
  - a) Kelembagaan di bidang permodalan  
Kelembagaan ini juga sangat bervariasi mulai dari perbankan, dana ventura, maupun dana dari penyisihan keuntungan BUMD. Kelembagaan permodalan ini menyediakan modal bagi sektor agribisnis baik berbasis komersial maupun menyalurkan kredit program yang pada umumnya diskemakan oleh pemerintah.
  - b) Kelembagaan di bidang penyediaan alat, mesin dan kendaraan  
Wujud kelembagaan ini berupa perusahaan/ industri pembuatan dan perakitan alsintan baik skala besar maupun skala menengah dan kecil, termasuk usaha perbengkelan yang melakukan perakitan dan pembuatan alsintan sederhana yang tersebar di daerah.
  - c) Kelembagaan aparatur  
Kelembagaan aparatur yang melaksanakan fungsi pelayanan/ penyuluhan adalah Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain dari kelembagaan penyuluhan, ada pula kelembagaan aparatur yang memiliki fungsi pengaturan dan pembinaan antara lain adalah organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah serta instansi terkait, serta Dinas Pertanian dan Instansi terkait di tingkat daerah.<sup>10</sup>

### **c. Sejarah Perkembangan Agribisnis Usaha Tani di Indonesia**

Perjalanan pengembangan agribisnis di Indonesia secara umum mengalami fase jatuh-bangun yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Periode jatuh bangun tersebut sebenarnya amat berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan ekonomi secara umum. Pada era 1970-an Indonesia cukup berhasil membangun fondasi atau basis pertumbuhan ekonomi yang baik setelah pembangunan pertanian dan sistem agribisnis terintegrasi cukup baik ke dalam kebijakan ekonomi makro.<sup>11</sup>

Pemerintah Indonesia meluncurkan suatu program pembangunan pertanian yang dikenal secara luas dengan program Revolusi Hijau yang dimasyarakat petani dikenal dengan program BIMAS. Tujuan utama dari program tersebut adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Revolusi Hijau memakan waktu lebih dari 20 tahun dan telah berhasil mengubah sikap para petani khususnya para petani sub sektor pangan, dari anti teknologi ke

---

<sup>10</sup> Silvina Maulidah, *pengantar manajemen agribisnis*, 13-16.

<sup>11</sup> Bustanul Arifin, "Refleksi dan Pengembangan Agribisnis Indonesia," *Jurnal Agrimedia* 9, No.1 (2004): 4

sikap yang mau memanfaatkan teknologi pertanian modern. Perubahan sikap petani sangat berpengaruh terhadap kenaikan produktivitas sub sektor pangan sehingga Indonesia mampu menyoal swasembada pangan.<sup>12</sup>

Hasil besar yang secara nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat banyak adalah terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri (swasembada) pada pertengahan 1980 an. Ekonomi nasional tumbuh cukup tinggi, bahkan lebih dari 7 persen per tahun, karena kuatnya basis pertanian dan sumber daya alam. Kesempatan kerja meningkat pesat dan kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap pertumbuhan tenaga kerja baru juga amat besar. Akan tetapi, kondisi kondusif tersebut harus berakhir secara tragis ketika pada akhir 1980-an ekonomi pertanian dan agribisnis harus menderita cukup serius. Sektor pertanian mengalami fase dekonstruktif dan tumbuh cukup rendah sekitar 3 persen karena proteksi besar-besaran pada sektor industri, apalagi berlangsung melalui konglomerasi yang merapuhkan sistem agribisnis serta fondasi ekonomi Indonesia pada umumnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Agustina Shinta, *Ilmu Usaha Tani* (Malang : UB Press, 2011), 14.

<sup>13</sup> Bustanul Arifin, "Refleksi dan Pengembangan Agribisnis Indonesia," 4-5.

**Tabel. 2.1 Dekomposisi Perjalanan  
Pembangunan Agribisnis (Persen Per  
Tahun)**

Uraian	Konsolidasi 1967-1978	Tumbuh tinggi 1978-1986	Dekonstruksi 1986-1997	Krisis ekonomi 1997-2001
1. PDB Pertanian	3.39	5.72	3.38	1.57
Tanaman Pangan	3.58	4.95	1.90	1.62
Tanaman Perkebunan	4.53	5.85	6.23	1.29
Peternakan	2.02	6.99	5.78	-1.92
Perikanan	3.44	5.15	5.36	5.45
2. Produksi Pertanian	3.57	6.76	3.99	-0.47
Produktivitas Lahan	2.08	4.13	1.83	-1.45
Produktivitas Tenaga Kerja	2.32	5.57	2.03	-0.47

Sumber : Bustanul Arifin (2004)

Ketika sektor pertanian harus menanggung dampak krisis ekonomi untuk menyerap limpahan tenaga kerja sektor informal dan perkotaan, daya tahan sektor pertanian tidak cukup kuat. Benar, pada periode 1998-2000 sektor pertanian sempat menjadi penyelamat ekonomi Indonesia, itu pun karena limpahan lonjakan nilai tukar dollar AS yang dinikmati komoditas ekspor sektor pertanian terutama perkebunan dan perikanan. Namun, ketika basis utama sektor pertumbuhan pertanian untuk membangun kualitas dilupakan begitu saja, sektor pertanian hanya tumbuh sekitar 1-2 persen. Tingkat pertumbuhan sebesar

itu tentu saja tidak mampu apalagi jika harus menyerap pertumbuhan tenaga kerja baru, terutama di pedesaan.<sup>14</sup>

Menurut Bungaran Saragih hal ini membuat pemerintah dalam hal ini departemen pertanian sebagai *stake holder* pembangunan pertanian mengambil suatu keputusan untuk melindungi sektor agribisnis yaitu “pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.” Karena kondisi dan perubahan yang ada adalah persoalan sistem, maka pendekatan *recoverynya* maupun pembangunan kembali landasan pembangunan tidak boleh sepotong-sepotong, melainkan harus dilakukan secara sistem, yakni sistem agribisnis. Paradigma baru pembangunan pertanian tersebut diimplementasikan dengan kebijakan dasar yakni kebijakan perlindungan dan promosi agribisnis (*protection and promotion policy*). Prinsip kebijakan ini adalah pemerintah memfasilitasi dan membantu tumbuh kembangnya usaha agribisnis khususnya petani di seluruh daerah dan sekaligus melindungi agribisnis *domestic* dari praktek *unfair-trade* (*dumping*) dari negara lain.<sup>15</sup>

#### **d. Pembangunan Berwawasan Agribisnis di Indonesia**

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai negara agraris dan maritim. Selama ini, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan komparatif tersebut telah berkembang di

---

8. <sup>14</sup>Bustanul Arifin, “Refleksi dan Pengembangan Agribisnis Indonesia,”

<sup>15</sup>Agustina Shinta, *Ilmu Usaha Tani*, 17.

Indonesia yang merupakan salah satu subsistem agribisnis. Pengalaman masa lalu membuktikan bahwa pembangunan pertanian saja yang tidak disertai dengan pengembangan industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung secara harmonis dan simultan, tidak mampu mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (*comparative advantage*).

Meskipun Indonesia berhasil menjadi salah satu produsen terbesar beberapa komoditi pertanian dunia, tetapi Indonesia belum memiliki kemampuan bersaing di pasar Internasional. Selain itu, nilai tambah (*value added*) yang kita raih dari pemanfaatan keunggulan komparatif tersebut masih relatif kecil sehingga tingkat pendapatan masyarakat tetap rendah.

Belajar dari pengalaman masa lalu tersebut, pendekatan pembangunan ekonomi dalam rangka mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing perlu diubah dari pembangunan pertanian menjadi pembangunan sistem agribisnis di mana pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung dikembangkan secara harmonis dan simultan.

Pembangunan sistem agribisnis tersebut perlu ditempatkan bukan saja sebagai pendekatan baru pembangunan, tetapi lebih dari itu, pembangunan sistem agribisnis perlu dijadikan penggerak utama (*grand strategy*) pembangunan Indonesia secara keseluruhan (*agribusiness led development*). Hal ini didasarkan karena alasan berikut.

1) Amanat konstitusi dan landasan politik

Indonesia sebagai negara yang dibangun di atas konstitusi UUD 1945,

harus mendasarkan pembangunannya, termasuk pembangunan ekonomi pada amanat konstitusi dasar. Dalam bidang ekonomi, pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan ekonomi berbasis kerakyatan.

Sumberdaya yang dimiliki oleh rakyat Indonesia adalah sumber daya manusia (tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai, dan sebagainya) dan sumber daya alam (lahan, keanekaragaman hayati, agroklimat tropis, dan sebagainya). Kedua sumber daya tersebut merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berbasis pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hanya dengan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dimungkinkan jumlah penduduk, keanekaragaman sosial budaya masyarakat dan sumber daya alam menjadi subjek dan modal pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, tidak berarti mengesampingkan pemanfaatan sumber daya modal (*capital*) dan teknologi, serta manajemen modern. Modal, teknologi, dan manajemen modern sangat diperlukan, tetapi dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam melalui pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya impor juga tetap diperlukan, tetapi penggunaannya harus hati-hati dan disesuaikan dengan upaya memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam domestik.

- 2) Sektor pertanian memberi sumbangan yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
- 3) Sektor pertanian merupakan sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia.
- 4) Sektor pertanian mampu menyediakan keragaman menu pangan, karenanya sektor pertanian sangat memengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat.
- 5) Sektor pertanian mampu mendukung sektor industri, baik industri hulu maupun industri hilir.
- 6) Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang devisa negara.

Bagi Indonesia, agribisnis berkembang dan berprospek cerah karena kondisi wilayah yang menguntungkan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Lokasinya di garis khatulistiwa yang menyebabkan adanya sinar matahari yang cukup bagi perkembangan sektor budidaya pertanian.
- 2) Kondisi lahan yang relatif subur.
- 3) Lokasi Indonesia berada di luar zona angin taufan seperti yang banyak menimpa Filipina, Taiwan, dan Jepang.
- 4) Keadaan sarana dan prasarana seperti daerah aliran sungai, tersedianya bendungan irigasi, jalan di pedesaan yang relatif baik, mendukung berkembangnya agribisnis.
- 5) Adanya kemauan politik pemerintah yang masih menempatkan sektor pertanian menjadi sektor andalan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2018), 14-16.

Selain itu pembangunan agribisnis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) APBN kementerian pertanian.
- 2) Pengembangan kapasitas institusi kementerian pertanian.
- 3) Pembangunan sumberdaya insani pelaku agribisnis.
- 4) Pembangunan prasarana, pengadaan sarana dan manajemen sumberdaya alam pertanian.
- 5) Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- 6) Pembangunan sistem inovasi.
- 7) Penyediaan pangan masyarakat.
- 8) Perlindungan produk pertanian melalui perkarantinaan.<sup>17</sup>

Hambatan dalam pembangunan agribisnis di Indonesia terletak pada berbagai aspek, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pola produksi beberapa komoditi pertanian tertentu terletak di lokasi yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan pembinaan dan menyulitkan tercapainya efisiensi pada skala usaha tertentu.
- 2) Sarana dan prasarana, khususnya yang ada di luar Jawa terasa belum memadai sehingga menyulitkan untuk mencapai efisiensi usaha pertanian.
- 3) Akibat poin 2 dan kondisi negara yang terdiri dari banyak pulau, biaya transportasi menjadi lebih tinggi.
- 4) Sering dijumpai adanya pemusatan agroindustri yang terpusat di kota-kota besar sehingga nilai bahan baku pertanian

---

<sup>17</sup> Renstra Kementan RI, “ 19 Tahun 2015, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019,”(6 April 2015), 67-68.

menjadi lebih mahal untuk mencapai lokasi agribisnis tersebut.

- 5) Sistem kelembagaan, terutama di pedesaan terasa masih lemah sehingga kondisi seperti ini kurang mendukung berkembangnya agribisnis. Akibat dari lemahnya kelembagaan ini dapat dilihat dari berfluktuasinya produksi dan harga komoditi pertanian.

Konflik tentang masalah efisiensi inilah yang menyebabkan pembahasan terhadap agribisnis tetap menarik. Masalahnya bukan saja terletak pada aspek produksi, pengolahan hasil dan pemasaran saja, tetapi juga pengaruh yang lain. Dengan adanya persaingan yang ketat tentang pemasaran hasil pertanian di pasar dunia (*world market*), menuntut peranan kualitas produk dan kemampuan menerobos pasar dunia menjadi semakin penting. Kemampuan mengantisipasi pasar (*market intellegent*) pun menjadi amat penting, untuk itu bentuk usaha yang skala kecil perlu digabung dalam skala usaha yang lebih besar agar mampu bersaing di pasar Internasional. Untuk menjaga kelangsungan kemampuan menerobos pasar ini, kontinuitas bahan baku pertanian perlu dijamin, bukan saja dalam jumlah bahan baku yang diperlukan, tetapi juga kualitas dan kontinuitasnya.<sup>18</sup>

**e. Strategi dan kebijakan pembangunan agribisnis**

Proses perkembangan pembangunan ekonomi menghendaki adanya berbagai tindakan penyesuaian. Penyesuaian tersebut memerlukan reorientasi pembangunan pertanian agar proses pembangunan pertanian

---

<sup>18</sup>Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, 16-17.

yang berangkat dari orientasi peningkatan produksi, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strateginya menjadi proses pembangunan yang berwawasan agribisnis yang kompetitif dan secara sistematis dirancang untuk bermuara pada kesejahteraan yang adil dan merata.

Reorientasi arah pembangunan pertanian tersebut pada dasarnya adalah rancangan strategi untuk dapat menjawab tantangan-tantangan masa depan, yang pada hakikatnya merupakan antisipasi untuk menangkap signal-signal dari adanya kecenderungan dan perubahan lingkungan strategi, baik lingkungan global maupun nusantara.

Meskipun ada perubahan orientasi dan wawasan tetapi tujuan pembangunan pertanian tetap konsisten diarahkan kepada perwujudan amanat pembangunan nasional, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memenuhi permintaan dan memperluas pasar, melalui pengembangan postur pertanian yang maju, efisien dan tangguh, serta yang semakin mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan wilayah.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, secara sadar dilakukan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sistem agribisnis dengan agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Terkait dengan iklim kondusif itu, perlu ditanggapi berbagai kecenderungan-kecenderungan yang

berimplikasi perlunya pergeseran peran dan perilaku birokrasi, seperti mengurangi campur tangan pemerintah dalam mekanisme ekonomi dan pasar, serta adanya dunia swasta yang mampu menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian.<sup>19</sup>

**f. Tantangan, Peluang dan Prospek Perkembangan Agribisnis**

Rendahnya pendapatan penduduk pedesaan, terutama yang bekerja di sektor pertanian ada hubungannya dengan struktur pertanian atau pedesaan yang kurang kondusif bagi perkembangan agribisnis yang dinamik dan kompetitif, karena sosok usaha tani yang lemah, prasarana fisik dan non fisik yang masih belum memadai, serta terbatasnya jangkauan pasar. Hampir seluruh produksi pangan dan sebagian besar hasil perkebunan, peternakan dan perikanan adalah hasil dari jerih payah petani, peternak dan nelayan yang tertumpu pada usaha tani keluarga yang berlahan sempit, yang didukung dengan sumber daya manusia dan IPTEK yang masih tertinggal. Kondisi struktural demikian itu menyebabkan terbatasnya kemampuan petani untuk menjangkau sarana produksi dan kesempatan memperoleh sinergi yang diperlukannya untuk berkembang.

Ditinjau dari aspek dukungan pendanaan dari perbankan ternyata investasi pertanian juga sangat kurang diminati dunia usaha. Hal ini menjadi salah satu indikator dari adanya suku bunga perbankan yang dirasakan terlalu tinggi untuk usaha tani di pedesaan dan fakta bahwa lembaga dan sistem perbankan

---

<sup>19</sup> Soetrisno dan Anik Suwandari, *Pengantar Ilmu Pertanian (Agraris Agribisnis Industri)* (Malang : Intimedia, 2016), 131-132.

belum sepenuhnya menjangkau petani, baik dari segi kelembagaannya maupun prosedurnya. Walaupun jangkauan itu sampai ternyata lembaga perbankan telah menjadi sarana untuk mengalirkan dana dari pedesaan ke perkotaan, karena pedesaan lebih banyak menyimpan dari pada meminjam. Di sini terlihat bahwa ketertinggalan dan keterbatasan petani ternyata merupakan faktor kondisional yang berada di balik mengalirnya dana dari pedesaan ke perkotaan tersebut.

Kondisi lain yang ikut memperlambat laju penanaman modal di sektor pertanian adalah keharusan untuk sejak awal menerapkan pendekatan terpadu yang utuh. Kebanyakan produk pertanian mempunyai karakteristik yang mudah rusak dan bervolume besar dibandingkan dengan nilainya. Penanganan pasca panen, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan lancarnya pemasaran menjadi sangat penting. Apabila penanaman modal tidak mampu menerapkan prinsip integrasi vertikal dalam investasinya ia terpaksa harus bergantung kepada adanya investasi lain yang menjamin hadirnya semua mata rantai yang diperlukan agar produknya dapat dipasarkan dengan baik.

Hal-hal yang juga memberikan andil dalam memperlebar kesenjangan antar wilayah maupun diantara masyarakat pedesaan sendiri, antara lain:

1) Kegagalan pasar

Dari pengalaman selama ini dapat ditunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang mengandalkan pada kekuatan pasar saja justru hanya dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Masyarakat ekonomi lemah termasuk di dalamnya

petani kecil di pedesaan tidak mampu memanfaatkannya.

- 2) Kebijakan yang cenderung bersifat uniform

Seperti diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai keragaman tinggi. Homogenitas kebijaksanaan pembangunan baik regional maupun sektoral, tanpa memperhatikan keragaman di atas, akan menghasilkan respon yang berbeda antara pelaku ekonomi yang kuat dan yang lemah maupun antara daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan prasarana dengan daerah yang miskin.

Berhadapan dengan berbagai tantangan yang menggugah tekad untuk menghadapinya, terbuka luas peluang berkembangnya agribisnis untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri akan berbagai hasil pertaniannya, yang lokasi dan sumber dayanya berada di Indonesia, serta didukung dengan sumber dayam manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, organisasi dan manajemen, serta modal,kekayaan sosial ekonomi dan sosial budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang yang handal. Landasan hasil-hasil pembangunan pertanian yang sudah diletakkan oleh proses pembangunan sampai akhir PJP I adalah asset nasional yang secara fungsional dan struktural menjadi kekuatan nasional untuk pembangunan sisten agribisnis yang mawadahi perakitan berbagai perangkat kegiatan pembangunan pertanian dalam satuan-satuan kelembagaan pelaku ekonomi yang handal.

Peluang dari segi permintaan timbul di samping karena dinamika pertumbuhan penduduk, juga karena dinamika pertumbuhan

ekonomi, sosial budaya dan arus globalisasi. Penduduk yang bertambah, pertumbuhan perkotaan, industrialisasi, peningkatan pendapatan, peningkatan kecerdasan atau pendidikan dan lain-lain, merupakan perubahan lingkungan strategis dari sisi permintaan yang jika diantisipasi dan diapresiasi secara tepat akan menjadi peluang usaha agribisnis yang menjanjikan nilai tambah. Dari segi penawaran peluang itu terbuka karena kemampuan ekonomi pedesaan yang semakin besar dan semakin terbuka sebagai hasil dari perubahan dan kemajuannya dalam transformasi struktural pertanian tradisional menjadi pertanian dan pedesaan maju. Berkat pengalaman dan pelajaran yang diraih dalam proses pembangunan dan modernisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan, ekonomi pedesaan sudah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi nasional. Proses perubahan untuk menjawab kebutuhan pangan nasional itu telah mengembangkan kelembagaan sistem agribisnis di pedesaan, yaitu perangkat yang menjadi penghantar masukan IPTEK, sarana, dana dan jasa, serta industri pengolahan hasil secara meluas di seluruh pedesaan.

Tantangan dan peluang serta kondisi sumber daya pertanian yang merupakan kekayaan sumber daya potensial dalam menapak era pembangunan PJP II dan yang dilengkapi dengan kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi ke pedesaan, menempatkan pembangunan pertanian pada posisi sebagai area pembangunan ekonomi yang perlu melakukan penyesuaian dalam pendekatan yaitu dari orientasi usaha tani untuk mencukupi kebutuhan menjadi pendekatan agribisnis untuk meraih nilai tambah bagi wilayah pedesaan

melalui kemampuannya untuk bersaing guna mencapai kesejahteraan yang adil dan merata.

Strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis merupakan upaya sistemik yang ampuh dalam mencapai tujuan ganda, antara lain :

- 1) Menarik dan mendorong sektor pertanian.
- 2) Menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien dan fleksibel.
- 3) Menciptakan nilai tambah.
- 4) Meningkatkan penerimaan devisa.
- 5) Menciptakan lapangan kerja.
- 6) Memperbaiki pembagian pendapatan.

Dengan sistem agribisnis sebagai perangkat penggerak pembangunan pertanian, pertanian akan dapat memainkan peranan positif dalam pembangunan nasional, baik dalam pertumbuhan, pemerataan maupun stabilitas. Adalah wajar apabila ternyata masyarakat pembangunan selalu dihadapkan dengan kenyataan bahwa sasarannya selalu meningkat di satu pihak padahal kendalanya ternyata mengikat di pihak lainnya. Pencapaian semua tujuan dan sasaran yang menjadi harapan itu tergantung kepada kehandalan dari sistem agribisnis yang dikembangkan.

Beberapa faktor strategis yang terkait dengan kehandalan tatanan agribisnis yang dikembangkan itu adalah :

- 1) Lingkungan strategis

Dasawarsa terakhir ini ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan mendasar pada struktur ekonomi dunia. Keadaan perekonomian serta pola perdagangan dan industri internasional saat ini diwarnai arus globalisasi, dalam bentuk tumbuh dan berkembangnya blok-blok kerjasama regional dan menyatunya

kawasan dan kekuatan ekonomi besar. Contoh yang sangat tampak antara lain MEE (pasar tunggal eropa) atau *European Economic Community*, pasaran bersama Amerika Utara Atau *North America Free Trade*(NAFTA), perkembangan kegiatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik atau *Asia Economic Cooperation* serta berbagai kebangkitan ekonomi di wilayah Eropa Timur. Bahkan terealisasinya “korporasi” antara Indonesia-Malaysia-Singapura dalam *Triangke Growth* serta AFTA (*Asean Free Trade Area*) merupakan indikasi perubahan struktur tersebut.

Pengaruh globalisasi dengan sangat cepat menyusup pada struktur dan strategi badan-badan usaha multinasional (TNE = *Trans National Enterprises*). Persaingan antar industri telah berubah dengan munculnya kerjasama antar badan-badan usaha yang selama ini saling bersaing, untuk mencapai tingkat keuntungan ekonomi yang tinggi. Dampak daripada seringkali sulit untuk diantisipasi karena pengaruhnya dapat saja melanggar kaidah-kaidah ekonomi yang fundamental. Gambaran tersebut sesungguhnya menunjukkan betapa teori keunggulan komparatif tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia dewasa ini.

## 2) Permintaan

Dalam dunia pertanian dampak globalisasi ekonomi akan segera terlihat pada sektor-sektor produksi dari berbagai komoditas pertanian. Jika ingin terus meningkatkan kemampuan bersaing komoditas pertanian kita di pasar

internasional, maka mau tidak mau harus mampu menangkap setiap gejala ataupun pergerakan yang terjadi pada pasar internasional tersebut. Jelas bahwa kecenderungan peningkatan produksi komoditas primer di satu pihak, yang disertai lambannya pertumbuhan permintaan, telah menimbulkan kelebihan penawaran yang pada gilirannya akan semakin menajamkan persaingan antar sesama negara produsen. Sementara itu negara-negara konsumen menjadi semakin sadar akan kepentingannya dalam menghadapi negara produsen, sehingga sistem produksi pertanian harus senantiasa dikelola dengan berorientasi pada permintaan pasar.

Perubahan perilaku dan selera pasar yang semakin cepat sangat sulit untuk diantisipasi dengan tepat oleh negara-negara produsen. Teknologi industri yang semakin canggih semakin menuntut keefisienan ekonomi, keandalan kualitas, disiplin serta profesionalisme dengan segala etika yang terkait dengannya.

Agar bisa menjabarkan implikasi operasional tindakan pembangunan yang tepat ditinjau dari watak permintaan pasar itu, diperlukan *market intelligence* dan *market information* sebagai perangkat lunak untuk meningkatkan daya saing dalam pemasaran atau perdagangan internasional, agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan segmentasi pasar, perubahan selera konsumen, pesaing potensial dan lain-lain.

### 3) Sumber daya

Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam. Masalahnya adalah bagaimana mengelola, memanfaatkan secara optimal dan sekaligus memperluas *resource base* dari sumber daya alam yang dimaksud, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Secara hakiki, upaya pembangunan yang sedang ditempuh pada saat ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai sumber daya potensial yang tersedia di setiap wilayah maupun yang dapat diusahakan dari luar wilayah yang bersangkutan. Di antara sumber daya potensial tersebut, ada yang berupa sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) serta sumber daya buatan (*man-made resources*).

Semua gambaran tersebut, pada dasarnya menunjukkan bahwa potensi sumber daya pertanian memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan prinsip-prinsip keunggulan kompetitif tanpa meninggalkan dua prinsip penting, yaitu wawasan agroekosistem dan wawasan lokalita/wilayah/regional. Kedua wawasan tersebut pada dasarnya memberikan arah agar kegiatan agribisnis selalu memperhatikan kondisi dan potensi sumber daya alam dan lingkungannya.

### 4) Ilmu pengetahuan dan teknologi

Ilmu dan teknologi merupakan perangkat instrumental hasil karya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyanya, termasuk karya dalam

menumbuhkembangkan agribisnis di pedesaan. Peningkatan produktivitas dan efisiensi setiap simpul dalam rangkaian sistem agribisnis akan menghasilkan perbaikan dalam perolehan nilai tambah secara proporsional bagi setiap pelaku di dalam rangkaian sistem tersebut.

Sarana pengembangan dan penyebaran serta adopsi IPTEK oleh sistem agribisnis tidak cukup hanya dengan eksistensi lembaga perguruan tinggi dengan litbang saja, tetapi juga memerlukan hadirnya secara menyeluruh di pedesaan fasilitas belajar seperti adanya lembaga penyuluhan pertanian, sekolah-sekolah kejuruan, berbagai kursus keterampilan, serta juga lembaga konsultasi yang tersebar dan bergerak melayani masyarakat petani/pedesaan.

Berbagai tantangan, peluang, lingkungan strategis, permintaan/ penawaran, sumber daya dan IPTEK, beserta iklim kondusif yang diciptakan oleh perangkat kebijakan dan pengaturan adalah komponen fungsional/struktural dari perangkat masyarakat ekonomi yang menjadi wadah dari proses transformasi pembentukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai komponen tentunya dia hanya akan berarti apabila berada dalam tatanan tertentu yang memberinya posisi, aturan, daya, arah, takaran, dan ukuran yang tepat, guna terwujudnya transformasi menjadi luaran secara efisien dan menghasilkan nilai tambah yang optimal. Ini berarti dibutuhkan suatu sistem yang tepat agar pembangunan pertanian itu bisa menghantarkan pertanian kepada kondisi yang tangguh, maju

dan efisien. Sistem itulah yang disebut sistem agribisnis.<sup>20</sup>

## 2. Kelompok Wanita Tani

### a. Pengertian Kelompok Wanita Tani

Pertanian masih merupakan sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia terutama angkatan kerja yang bermukim di wilayah pedesaan. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan nilai ekonomis dari hasil pertanian.

Kemiskinan yang terjadi di pedesaan membutuhkan suatu tindakan pemberdayaan. Proses pemberdayaan hendaknya dapat dituangkan dalam bentuk aksi nyata dan disertai langkah-langkah pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan diberbagai segi kehidupan dalam suatu lingkungan sosial.<sup>21</sup> Oleh karenanya, perhatian pada pembangunan ekonomi agribisnis melalui pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) akan menjadi alternatif pengentasan kemiskinan, terutama penduduk pedesaan dimana mayoritas masih bergantung pada sektor pertanian.

Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia yang juga melibatkan tenaga kerja perempuan. Untuk tahun 2010 diperhitungkan sekitar 0,8 juta

---

<sup>20</sup> Soetrisno dan Anik Suwandari, *pengantar ilmu pertanian (agraris agribisnis industri)*, 132-138.

<sup>21</sup> Asriyanti Syarif, "Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Pada Usahatani Sayuran Di Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng," *Jurnal Ziraah* 43 No. 1, (2018) : 77-84.

tenaga kerja yang mampu diserap dari berbagai sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih tetap tinggi yaitu sekitar 41 juta orang atau separuh dari angkatan kerja nasional.

Salah satu peran perempuan dalam membangun pembangunan pertanian yaitu dengan ikut berperan dalam program-program yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Dengan meluncurkan program produk unggulan desa, kesempatan semakin terbuka lebar bagi kelompok wanita tani (KWT) dalam pengembangan produksi dari sumberdaya yang tersedia. Produksi akan meningkatkan nilai ekonomis bahan mentah yang tersedia dari petani yang akan menguntungkan kedua belah pihak, baik petani maupun Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai produsen.

Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan kaum perempuan dilakukan dengan memberikan alokasi APDB/APBN yang lebih besar terhadap kaum perempuan. Diharapkan semakin banyak perempuan terlibat di sektor pertanian. Perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan sosial, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2009, yang diwujudkan dalam kesempatan pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan sumberdaya manusia. Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah wadah yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan sektor pertanian. Terbentuk karena adanya adanya jenis usahatani yang sama mereka geluti, lokasi tempat tinggal yang berdekatan, dan adanya

persamaan persepsi dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan ekonomi.<sup>22</sup>

Salah satu contoh kesempatan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah dalam pembentukan agroindustri di pedesaan. Pengembangan agroindustri pada dasarnya diharapkan untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani dalam memberikan nilai tambah suatu produk pertanian terutama di pedesaan yang memiliki perekonomian rendah. Agroindustri merupakan suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Kelompok wanita tani ini dalam pembinaannya diarahkan untuk mempunyai suatu usaha produktif dalam skala rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil pertanian.<sup>23</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu: Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Dalam Pengembangan Potensi Usaha Agribisnis Desa Sendangcoyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vera Nur Fatmawati tahun 2018, dengan judul "*Peran Kelompok Wanita*

---

<sup>22</sup>Asriyanti Syarif, Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Pada Usahatani Sayuran Di Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng, 78.

<sup>23</sup>Endah Rahayu Lestari Dan Linda Citra Amelia," Analisis Kinerja Usaha Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Kediri,"(Prosiding Seminar Nasional FKPT-TPI 2017, Sulawesi Tenggara, 20-21 September 2017).

*Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Pada Kelompok Wanita Tani Putri Mandiri Desa Kebanggan Kecamatan Sumbang*“. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kelompok wanita tani putri mandiri dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kelompok Wanita Tani (KWT) “Putri Mandiri” berperan sebagai wadah untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pengolahan hasil pertanian dan Bank sampah, menjadi wadah untuk meningkatkan produktivitas melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, menjadi wadah untuk menambah pendidikan dan pengetahuan melalui kegiatan pertemuan rutin dan pelatihan. Dari kegiatan tersebut para anggota mampu meningkatkan pendapatan keluarga, dan menekan biaya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil dari setiap kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) “Putri Mandiri” dimanfaatkan oleh masing-masing anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>24</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebab penelitian peneliti terfokus pada peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengembangan potensi usaha agribisnis desa. Sedangkan penelitian di atas terfokus pada peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang peran Kelompok Wanita Tani (KWT).

---

<sup>24</sup> Vera Nur Fatmawati, *Peran Kelompok Wanita Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Pada Kelompok Wanita Tani Putri Mandiri Desa Kebanggan Kecamatan Sumbang*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'rifah Ulumia tahun 2018, dengan judul "*Peran Kelompok Wanita Tani Pedesaan dalam Menunjang Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Kelompok Wanita Tani (KWT) "Sri Rahayu" Desa Kuntili RW 02 Kecamatan Sumpiuh)*". Penelitian ini bertujuan membangun pertanian sebagai sektor pendukung yang penting bagi pembangunan industri yang mampu membawa warga di pedesaan yang masih tertinggal dan belum mencapai kecukupan pangan (kalori, protein) ke arah tingkat hidup yang lebih layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Wanita Tani berperan dalam menunjang pendapatan keluarga melalui kegiatan-kegiatannya yaitu : pemanfaatan lahan pekarangan, kegiatan berternak ayam, kelinci, lele, dan pemanfaatan hasil pertanian. Dari kegiatan tersebut para anggota mampu menunjang pendapatan keluarga, dan menekan biaya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. dari hasil penelitian faktor pendukung dalam menunjang pendapatan keluarga adalah adanya kerjasama yang baik antar anggota dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Kelompok Wanita Tani "Sri Rahayu", sedangkan faktor penghambat dalam menunjang pendapatan keluarga adalah faktor cuaca, pengelolaan beternak yang kurang baik, dan waktu yang harus terbagi untuk mengurus keluarga dan mencari nafkah.<sup>25</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebab penelitian penelitian terfokus pada peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengembangan potensi usaha agribisnis Desa. Sedangkan penelitian di atas

---

<sup>25</sup>Ma'rifah Ulumia, *Peran Kelompok Wanita Tani Pedesaan dalam Menunjang Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rahayu Desa Kuntili RW 02 Kecamatan Sumpiuh)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

terfokus padaperan Kelompok Wanita Tani Pedesaan dalam menunjang pendapatan keluarga. Adapun kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang peran Kelompok Wanita Tani.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Munifatuz Zahro tahun 2017, dengan judul “ *Peran Kelompok Wanita Tani Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota*”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk keterlibatan Kelompok Wanita Tani Hijau Asri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Kelompok Wanita Tani Hijau Asri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kota meliputi bentuk keterlibatan fasilitator, mediator, dan motivator. Sedangkan hasil kelompok wanita tani hijau asri dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat kota meliputi partisipasi masyarakat, kemandirian masyarakat, dan peningkatan ekonomi masyarakat.<sup>26</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebab penelitian penelitian terfokus pada peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengembangan potensi usaha agribisnis Desa. Sedangkan penelitian di atas terfokus pada peran Kelompok Wanita Tani pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota. Adapun kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang peran Kelompok Wanita Tani.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita Diah Kurniawati 2017, dengan judul “*Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) “Rizki Lestari” dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan*”. Tujuan dari penelitian ini pada

---

<sup>26</sup> Munifatuz Zahro, *Peran Kelompok Wanita Tani Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

dasarnya untuk mengetahui peran Kelompok Wanita Tani (KWT) “Rizki Lestari” dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan menciptakan ketahanan pangan rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) “Rizki Lestari” dalam pemberdayaan perempuan, dan tingkat efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) “Rizki Lestari” dalam pemberdayaan perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran peran Kelompok Wanita Tani (KWT) “Rizki Lestari” dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan menciptakan ketahanan pangan rumah tangga adalah sebagai wadah tempat berkumpulnya para perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan inovasi baru tentang kegiatan pertanian yang berbasis agropolitan agar para perempuan mampu menggali potensinya sehingga menjadi perempuan yang produktif dan mandiri yang mampu mendapatkan pendapatan ekonomi dan menciptakan ketahanan pangan untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebab penelitian terfokus pada peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengembangan potensi usaha agribisnis Desa. Sedangkan penelitian di atas terfokus pada efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) “Rizki Lestari” dalam pemberdayaan perempuan berbasis agropolitan. Adapun kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang peran Kelompok Wanita Tani.<sup>27</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Destia Nur Mayasari tahun 2014, dengan judul “Peran

---

<sup>27</sup>Nurlita Diah Kurniawati, *Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017.

*Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) “Laras Asri” Pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran anggota KWT, mendiskripsikan faktor yang menghambat dan mendukung anggota KWT pada peningkatan kesejahteraan keluarga di Dusun Daleman, Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota KWT berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan KWT “Laras Asri”. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: simpan pinjam dan arisan, beternak ayam dan kambing, budidaya lele, pemanfaatan pekarangan kosong, pengolahan hasil pertanian dan pengolahan hasil peternakan. Anggota KWT “Laras Asri” tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengelola rumah tangga, mengasuh anak. Anggota KWT dapat menyeimbangkan antara tugasnya di KWT dan di rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah faktor ekonomi dan waktu. Faktor pendukung yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan keluarga anggota KWT adalah adanya kerjasama yang baik dengan semua anggota KWT, adanya dukungan dari dinas terkait, dan dari semua pihak yang mendukung kegiatan-kegiatan di KWT “Laras Asri”.<sup>28</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebab penelitian terfokus pada peran Kelompok Wanita Tani (KWT)

---

<sup>28</sup>Destia Nur Mayasari, *Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) “Laras Asri” Pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2014.

dalam pengembangan potensi usaha agribisnis Desa. Sedangkan penelitian di atas terfokus padaperan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) “Laras Asri” pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Adapun kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang peran Kelompok Wanita Tani.

### C. Kerangka Berfikir

Wilayah pedesaan terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Mulai dari penguasaan lahan, air dan sumber daya lainnya menjadikan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama penduduk pedesaan. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, pembangunan agribisnis akan menjadi peluang besar, dan menguntungkan dimasa yang akan datang.

Dari tahun ketahun, sektor pertanian Desa Sendangcoyo mengalami banyak perkembangan. Tidak hanya terpaku pada cocok tanam dan perkebuan, program desa wisata telah merintis beberapa destinasi wisata. Respon positif dari masyarakat lokal maupun pengunjung dari berbagai daerah menjadikan Desa Sendangcoyo semakin dikenal dengan destinasi wisatanya. Mulai dari lokasi *outbound*, *camping*, *flying fox*, hingga jembatan gantung yang berada diatas aliran sungai yang mengalir. Menjadikan lokasi-lokasi ini salah satu yang diminati pengunjung untuk menghabiskan waktu akhir pekan maupun pada hari libur.

Untuk mendampingi berkembangnya unit usaha Desa Wisata Sendangcoyo Asri ini, mulailah dibentuk pengolahan produk unggulan desa, yang bahan dasar pembuatannya berasal dari hasil panen petani lokal Desa Sendangcoyo yang dikelola sepenuhnya oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) “Mawar Merah”. Ini bertujuan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta mempermudah pendistribusian hasil panen. Program tersebut juga terbuka lebar bagi

masyarakat untuk berkeaktifitas dalam pengolahan hasil panen, sebagai bentuk pembinaan masyarakat ekonomi mandiri.

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan Lembaga nonformal yang didirikan berdasarkan usulan dari Petugas Pekerja Lapangan (PPL) Kelompok Wanita Tani (KWT) tingkat Kecamatan, yang melihat potensi pertanian di Desa Sendangcoyo cukup besar. Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) bertujuan mempermudah komunikasi antara Dinas Pertanian khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT) tingkat Kecamatan untuk pelatihan dan pengawasan, dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat petani Desa.

Dengan keterampilan yang didapatkan dari berbagai pembinaan dari Dinas Pertanian melalui Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Lasem, Kelompok Wanita Tani (KWT) “Mawar Merah” diberikan tanggungjawab untuk mengelola kegiatan pengolahan produk unggulan desa, antara lain: bubuk jamu kunir asem, abon tewel, ceriping pisang, ceriping enthik, ceriping bothe dan ceriping sukun. Tidak hanya itu, Kelompok Wanita Tani (KWT) “Mawar Merah” juga melakukan berbagai kegiatan dalam lingkungan pertanian, salah satunya adalah melakukan pertemuan rutin sebagai bentuk edukasi peningkatan keterampilan Kelompok Wanita Tani (KWT) “Mawar Merah” seputar pengembangan teknik pertanian. Melakukan pemasaran produk unggulan desa, yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah dibuat satu akun khusus dalam sosial media guna memperkenalkan serta memasarkan produk. Tidak hanya itu, dalam membangun loyalitas pelanggan, setiap anggota berinteraksi langsung dengan calon pembeli disetiap ada kesempatan, misalnya pada saat mengikuti pelatihan anggota yang ditunjuk sebagai perwakilan akan membawa *sample* produk untuk ditawarkan kepada peserta dari berbagai daerah yang

mengikuti pelatihan. Inilah peran Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ikut berkontribusi dalam pengembangan potensi usaha agribisnis Desa, yang kini lebih dikenal dengan Desa Wisata Sendangcoyo Asri



**Bagan 2.1 Tabel Kerangka Berfikir**

